



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI X DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KE KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH
(PENGAWASAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK)
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 3-5 SEPTEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
6. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib
7. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 18 Agustus 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan spesifik bidang pendidikan dasar dan menengah program sekolah penggerak di Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Untuk melihat dan mengetahui secara langsung pelaksanaan dan perkembangan kebijakan sekolah penggerak, serta pemahaman pemangku kepentingan pendidikan dan pemerintah daerah
2. Untuk mendapatkan informasi kesiapan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan program sekolah penggerak dan mengetahui kendala serta permasalahannya.
3. Untuk mendapatkan masukan mengenai program sekolah penggerak, sebagai bahan bagi Komisi X untuk melakukan evaluasi kebijakan bidang pendidikan di Kemendikbudristek RI.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan dasar dan menengah Komisi X DPR RI adalah pertemuan dengan:

1. Bupati Sragen.
2. Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab Sragen.
4. Kepala Pusat/ Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Kab Sragen.
5. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kab Sragen.
6. Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Kab Sragen.

7. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan program sekolah penggerak di Kab Sragen.
8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan program sekolah penggerak di Kab Sragen.
9. Perwakilan Komite Sekolah.
10. Perwakilan Dewan Pendidikan Kab Sragen.

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan dasar dan menengah Komisi X DPR RI ke kabupaten Sragen Jawa Tengah dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI (FPDIP) didampingi oleh perwakilan dari mitra kerja Komisi X, Kemendikbudristek RI yaitu Dr. Sutanto, S. H., M.A. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Tim di dampingi juga oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Sekolah yang mengikuti seleksi Sekolah Penggerak

Jenjang	Seleksi	Lulus
PAUD	81	13
SD	56	31
SMP	30	12
SMA	6	5

2. Jumlah sekolah yang ditetapkan menjadi Sekolah Penggerak

Jenjang	Sekolah Penggerak	Jumlah Sekolah
PAUD	7	936
SD	16	575
SMP	6	91
SMA	3	24

3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan Sekolah Penggerak di Sragen

Nama kegiatan	Tanggal
Sosialisasi Pelaksanaan IHT PSP	15 Juni 2021
Sosialisasi Tindaklanjut PSP	12 Juli 2021
Bimtek Komite Pembelajaran	16-26 Juli 2021
IHT Guru kelas VII selain KP	27 Juli - 4 Agt 2021
Pendampingan Komite Pembelajaran	Juli – Agustus 2021
Pelatihan Platform Merdeka Mengajar	26-30 Juli 2021

Diklat Program Roots Indonesia (Anti Perundungan) jenjang SMP	26 Juli 2021
Bimtek Program Anti Perundungan bagi Fasilitator	18-20 Agustus 2021
Workshop Bedah Panduan dan Penyusunan Modul Projek Profil Pelajar Pancasila	26-30 Agustus 2021
Workshop Pencegahan Perundungan	27-28 Agustus 2021
Sosialisasi Rakor Pelaksanaan PSP Jenjang SMP	30-31 Agustus 2021
Bimtek Pencairan Dana Anti Perundungan	2 September 2021

4. Dukungan dan Fasilitas dari Pemerintah

Finansial	Nonfinansial
Dana Pelaksanaan IHT Rp 10.000.000 (sudah)	Bimtek/Workshop (sudah)
Dana Roots Anti Perundungan Rp 10.000.000 (belum)	Buku Teks (belum)
BOS Kinerja Rp 100.000.000 (belum) semula direncanakan 175 juta berubah menjadi 100 juta	Aplikasi Pembelajaran (belum)

B. Permasalahan dan Temuan

1. Kurangnya sosialisasi dan pelaksanaannya juga berbarengan dengan dimulainya ajaran baru sehingga sangat memberatkan karena muncul berbagai kendala.
2. Buku Teks Guru dan Pelajar belum dikirim, sementara guru mencetak sendiri dari *softfile*, bagi siswa membaca buku yang ada di link sangat menyulitkan.
3. Keterbatasan jaringan internet di wilayah tempat tinggal pelajar maupun di sekolah.
4. Keterbatasan kuota internet bagi siswa.
5. Tidak semua pelajar memiliki gawai atau memiliki gawai yang tidak suport.
6. Sosialisasi kepada orang tua terkendala situasi PPKM, sehingga hanya bisa melalui aplikasi *Whatsapp*, hal ini mempengaruhi dukungan orang tua.
7. Projek Profil Pelajar Pancasila belum dapat dilaksanakan karena belum berjalannya Pendidikan Tatap Muka (PTM).
8. Adanya perubahan Pelaksanaan Kebijakan dan Alokasi Dana BOSKIN dari Permendikbudristek No. 16 tahun 2021 yang besar anggarannya 175 juta menjadi 100 juta, sementara RKAS awal sudah tersusun sesuai Juknis.

C. Pembahasan

Selama kunjungan spesifik pendidikan dasar dan menengah, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan pendidikan di kabupaten Sragen, di damping langsung oleh Bupati Sragen, Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Kemendikbudristek RI, antara lain;

1. Tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah daerah kabupaten Sragen dalam memfasilitasi satuan pendidikan di semua jenjang untuk mempersiapkan program sekolah penggerak.
2. Tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI mengapresiasi partisipasi aktif kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan di kabupaten Sragen yang secara aktif mengikuti proses seleksi program sekolah penggerak
3. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan program sekolah penggerak sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah (Pemda). Oleh karena itu, Kemendikbudristek RI harus terus berkoordinasi dengan Pemda untuk memastikan kesiapan pendukung implementasi kebijakan program sekolah penggerak.
4. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk menyiapkan konsep program sekolah penggerak secara matang dan memiliki pijakan hukum yang jelas, serta membuat jadwal sosialisasi terhadap satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kalender akademik/ tahun ajaran pendidikan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menyampaikan progress pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan menerima berbagai masukan dari perwakilan satuan pendidikan yang ada di kabupaten Sragen terutama terkait pengurangan nominal dan pencairan BOS Kinerja dan keterlambatan buku teks penunjang pembelajaran di sekolah penggerak.

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Bupati Sragen menyampaikan harapan adanya fasilitas pendidikan yang lebih banyak seperti yang didapatkan dalam Program Sekolah Penggerak, setidaknya kepada dua puluh sekolah unggul yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen menyampaikan Program Sekolah Unggul yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka upaya mengimbaskan Program Sekolah Penggerak di tingkat kabupaten karena Program Sekolah penggerak banyak memberikan manfaat bagi siswa, guru, kepala sekolah dan sekolah secara umum walaupun dalam awal diluncurkannya terdapat berbagai kendala.
3. Perwakilan Kepala Sekolah Peserta Program Sekolah Penggerak dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kendala utama menjalankan Program Sekolah Penggerak adalah dilaksanakannya KBM secara daring, sehingga manfaat dari program tersebut belum maksimal.
 - b. Kegiatan Belajar Mengajar secara daring secara umum masih terkendala terkait gawai, sinyal dan kuota internet.
 - c. Fasilitas yang didapatkan dari Program Sekolah Penggerak sudah diterima, tetapi beberapa diantaranya masih belum sampai seperti bantuan buku teks penunjang pembelajaran.
 - d. Peluncuran Program Sekolah Penggerak sangat dekat dengan dimulainya tahun ajaran baru, sehingga sosialisasi dan pelaksanaannya kurang maksimal.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari pertemuan yang dilakukan dengan pemangku pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sragen, Tim kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan – Sekolah Penggerak Komisi X DPR RI merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sudah cukup baik, bahkan membuat Program Sekolah Unggul untuk dapat mengimbaskan manfaat Program Sekolah Penggerak di tingkat kabupaten khususnya PAUD, SD dan SMP.
2. Program Sekolah Penggerak dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala, antara lain:
 - a. Kegiatan Belajar Mengajar yang masih dilakukan secara daring sehingga manfaat dari Program Sekolah Penggerak belum maksimal.
 - b. Kurangnya sarana prasarana pendukung pembelajaran, di antaranya jaringan internet lambat, kendala gawai atau perangkat pembelajaran seperti komputer / laptop / telepon genggam yang memenuhi spesifikasi, hingga keterlambatan buku teks penunjang pembelajaran di sekolah penggerak.
 - c. Sosialisasi dan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak kurang maksimal karena dimulai saat mendekati tahun ajaran baru.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi dan kesimpulan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan – Sekolah Penggerak Komisi X DPR RI ke Kabupaten Sragen merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak secara berkala agar kendala dalam pelaksanaan dapat diatasi sehingga target dari Program Sekolah Penggerak dapat tercapai.
2. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk memperbaiki komunikasi dan sosialisasi, sehingga setiap program maupun kebijakan dapat dipahami secara baik oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat secara umum.
3. Mendorong Kemendikbudristek RI dalam menjalankan Program Sekolah Penggerak memperhatikan juga pendidikan di sekolah inklusi.

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan – Sekolah Penggerak Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemangku pendidikan dasar dan menengah dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan – Sekolah Penggerak Komisi X DPR-RI ke Kabupaten Sragen, agar dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 6 September 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M.
A-185